

Original Article \*)

**Hubungan antara Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, Akses Pembayaran, Pengetahuan, dan Persepsi dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Pbpu Pekerja Mandiri**

*The Relationship Between Income, Number Of Family Members, Access To Payment, Knowledge, And Perception With Compliance With Payment Of Independent Workers' Pbpu Contributions*

**Rahmasari<sup>1</sup>, Rofi'atun Zakiah<sup>2</sup>, Nina<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Maju, Jakarta, Indonesia

\*Email correspondent: rahmasari05@gmail.com

---

**Abstract**

**Introduction:** National Health Insurance (JKN) participants who are not self-employed workers (PBPU Kerja Mandiri) are in second place with the largest number of participants with a total of 63.39 million participants, which has the potential to become the largest income-contributing segment for BPJS Health. The DJS (Social Security Fund) Health financial report, nationally the highest participant contribution arrears are for Non-Wage-Earning Independent Workers (PBPU-Mandiri Workers) participants (Rp. 5,654,930,976,944.00), namely 86.88% of total outstanding dues. The aim of this research is to determine the relationship between income, number of family members, access to payment, knowledge and perception and compliance with payment of PBPU contributions for independent workers at BPJS Health KC East Jakarta.

**Methods:** The type of research used was quantitative research using a cross sectional design with 100 respondents who are PBPU-Independent Workers participants in the East Jakarta BPJS Health Branch Office area. The data collected consisted of primary data and secondary data from BPJS office data and questionnaires.

**Results:** The research results show that there is a relationship between the variables income, number of family members, knowledge and perception, but the variable access to payment shows no relationship with compliance with paying contributions to the Independent Worker PBPU at BPJS Health KC East Jakarta.

**Discussion:** Suggestions for BPJS are to simplify the payment process, provide automatic reminders to participants, provide inserts for compliant participants, and carry out intensive monitoring and evaluation.

**Keywords:** bpjs, contributions, compliance, pay, pbpu

**Artikel**

Disubmit (Received) : 26 October 2023

Diterima (Accepted) : 01 December 2023

Diterbitkan (Published) : 04 December 2023

**Copyright: © 2021 by the authors. License DPOAJ, Jakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)**

## Pendahuluan

Sistem Jaminan Sosial Nasional terdiri dari dua jaminan yaitu, jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Menurut Perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yaitu suatu tindakan memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan kesehatan yang memungkinkan peserta mendapatkan perlindungan kesehatan dasar.<sup>1</sup> Sehingga jaminan kesehatan di Indonesia ditetapkan bersifat wajib untuk seluruh warga negara yang cakupannya menyeluruh (*universal health coverage*). Kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI-APBN), Penerima Bantuan Iuran-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI-APBD), Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN), Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), Pekerja Bukan Penerima Upah-Pekerja Mandiri (PBPU-Pekerja Mandiri), dan Bukan Pekerja (BP).<sup>2</sup> Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang bekerja diluar hubungan kerja atau peraturan ketenagakerjaan secara umum. Peserta pada segmen ini dapat diartikan sebagai pekerja pada sektor informal. Sektor informal berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai lingkungan usaha tidak resmi; lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta). Aktivitas sektor informal mencakup berbagai sub sektor seperti sub sektor pertambangan, pertanian, manufaktur, listrik, konstruksi, perdagangan, transportasi dan lain-lain.<sup>3</sup> Pilihan iuran peserta JKN yang harus dibayarkan oleh PBPU-Pekerja Mandiri jika memilih manfaat pelayanan kelas I maka iuran bulanan sebesar Rp150.000,00 per orang, untuk kelas II sebesar Rp100.000,00 dan kelas III sebesar Rp42.000,00.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dari website resmi BPJS Kesehatan menyatakan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bulan April 2023 mencapai 254,14 juta jiwa dari berbagai jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Mandiri (PBPU Pekerja Mandiri) menempati urutan kedua jumlah peserta paling banyak dengan total peserta 63,39 juta jiwa (24,9%). Setelah peserta Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI APBD) dengan total peserta 96,73 juta jiwa (38,1%).<sup>5</sup> Dari data ini menunjukkan bahwa kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Mandiri (PBPU-Pekerja Mandiri) berpotensi menjadi segmen penyumbang pemasukan terbesar bagi BPJS Kesehatan. Menurut laporan keuangan DJS (Dana Jaminan Sosial) Kesehatan (2018), secara nasional tunggakan iuran peserta paling tinggi pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Mandiri (PBPU-Pekerja Mandiri) (Rp5.654.930.976.944,00), yaitu sebesar 86,88% dari keseluruhan tunggakan iuran. Pekerja Bukan Penerima Upah Pekerja Mandiri (PBPU-Pekerja Mandiri) memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran bulanan paling lambat pada tanggal 10 tiap bulannya. Jika melewati tanggal 10, selanjutnya status kepesertaan akan ditangguhkan dan akan didenda sebesar 5% jika rawat inap dalam jangka waktu 45 hari sejak membayarkan tunggakan iuran tersebut.<sup>6</sup>

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.<sup>7</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta PBPU-Pekerja Mandiri pada bulan Maret 2023 sebanyak 831.779 orang di wilayah Kantor Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur.<sup>8</sup> Pada bulan Maret 2023 jumlah peserta 831.779 orang namun jumlah total iuran menunggaknya rendah dibanding dengan jumlah peserta menunggak sebelumnya 691.557 orang sehingga peneliti menetapkan populasi yang diambil dalam penelitian ini pada bulan Maret 2023. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan peneliti. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan kesalahan yang dapat ditoleransi ( $e$ ) sebesar 10% sehingga ditentukan sampel sebanyak 100 responden dengan Kriteria inklusi 1. Peserta BPJS PBPU Pekerja mandiri, 2. Kepala keluarga atau anggota keluarga yang bertanggung jawab membayarkan premi/iuran 3. Pasien/keluarga pasien bersedia untuk menjadi responden dan siap diwawancarai.<sup>9</sup> Adapun kriteria eksklusi responden adalah tidak bersedia menjadi responden. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor

Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Timur dan dilaksanakan pada Agustus sampai dengan September 2023. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari 100 responden melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari data BPJS Kesehatan tahun 2023 seperti total jumlah peserta PBU Pekerja Mandiri di kantor cabang Jakarta Timur, dan juga sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputerisasi program SPSS (*Statistical Packages for the Social Sciences*) versi 25. Analisis Data dilakukan dengan dua cara yaitu 1. Analisis univariat yang dilakukan terhadap tiap variabel hasil penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan distribusi dan presentasi dari setiap variabel penelitian dan untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel yang dipaparkan dalam tabel distribusi. 2. Analisis bivariat yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen dalam bentuk tabulasi silang (*crosstab*) dengan menggunakan program SPSS dengan uji statistik chi-square. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel yang menggunakan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ .<sup>10</sup>

### Hasil

Analisis univariat bertujuan untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi dan proporsi dari masing-masing variabel yang diteliti seperti Kepatuhan, Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, Akses Pembayaran, Pengetahuan, dan Persepsi di persentasikan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Distribusi Frekuensi (Univariat)

No	Kepatuhan membayar iuran	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Patuh	49	49,0
2	Tidak Patuh	51	51,0
No	Pendapatan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tinggi	73	73,0
2	Rendah	27	27,0
No	Jumlah Keluarga	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Kecil	37	37,0
2	Besar	63	63,0
No	Akses Pembayaran	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Mudah dijangkau	97	97,0
2	Sulit dijangkau	3	3,0
No	Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Kurang baik	40	40,0
2	Baik	60	60,0
No	Persepsi	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Negatif	47	47,0
2	Positif	53	53,0

Berdasarkan tabel 1 dari 100 responden, mayoritas responden yaitu 51 (51%) orang tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran. mayoritas responden yaitu 73 (73%) orang memiliki pendapatan tinggi. mayoritas responden yaitu 63 (63%) orang memiliki anggota keluarga yang besar. mayoritas responden yaitu 67 (67%) orang mudah mendapatkan akses pembayaran. mayoritas responden yaitu 60 (60%) orang memiliki pengetahuan baik mengenai BPJS. mayoritas responden yaitu 53 (53%) orang memiliki persepsi positif mengenai BPJS.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, terdapat responden dengan pendapatan tinggi dan patuh membayar iuran sebanyak 47 orang (64,4%), sedangkan yang pendapatannya rendah dan tidak patuh membayar iuran sebanyak 25 orang (92,6%). Dari hasil analisis

diperoleh juga nilai OR sebesar 22,596 artinya responden yang pendapatannya cukup berpeluang 23 kali lebih patuh membayar iuran dibandingkan responden yang pendapatannya kurang. Berdasarkan angka p-value (0.000) yang nilainya dibawah 0.05, maka artinya terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

**Tabel 2.** Hasil Analisis Bivariat

Variabel	Kepatuhan						P Value	OR	Upper - Lower
	Patuh		Tidak Patuh		Total				
	F	%	F	%	F	%			
<b>Pendapatan</b>									
Tinggi	47	64,4	26	35,6	73	100	0,000	22,596	(4,953 - 103,093)
Rendah	2	7,4	25	92,6	27	100			
<b>Anggota Keluarga</b>									
Kecil	32	86,5	5	13,5	37	100	0,000	17,318	(5,797 - 51,737)
Besar	17	27	46	73	63	100			
<b>Akses Pembayaran</b>									
Mudah dijangkau	49	50,5	48	49,5	97	100	0,085	0,495	(0,405 - 0,605)
Sulit dijangkau	0	0	3	100	3	100			
<b>Pengetahuan</b>									
Kurang baik	4	10	36	90	40	100	0,000	0,037	(0,011 - 0,121)
Baik	45	75	15	25	60	100			
<b>Persepsi</b>									
Negatif	3	6,4	44	93,6	47	100	0,000	0,01	(0,003 - 0,043)
Positif	46	86,8	7	13,2	53	100			

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, terdapat responden dengan anggota keluarga kecil dan patuh membayar iuran sebanyak 32 orang (86,5%), sedangkan responden yang keluarganya besar dan tidak patuh membayar iuran sebanyak 46 orang (73,0%). Dari hasil analisis diperoleh juga nilai OR sebesar 17,318 artinya responden yang keluarganya kecil berpeluang 17 kali lebih patuh membayar iuran dibandingkan responden yang keluarganya besar. Berdasarkan angka p-value (0.000) yang nilainya dibawah 0.05, maka artinya terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, terdapat responden yang mudah mengakses tempat pembayaran dan patuh membayar iuran sebanyak 49 orang (50,5%), sedangkan 3 (100%) responden yang sulit mengakses tempat pembayaran semuanya tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Berdasarkan angka p-value (0.085) yang nilainya diatas 0.05, maka artinya tidak terdapat hubungan antara akses tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, terdapat responden dengan pengetahuan kurang baik dan tidak patuh membayar iuran sebanyak 36 orang (90,0%). Sementara responden yang pengetahuannya baik dan patuh membayar iuran sebanyak 45 orang (75,0%) patuh melakukan pembayaran iuran BPJS, Dari hasil analisis diperoleh juga nilai OR sebesar 0,037 artinya responden dengan pengetahuan baik berpeluang 0,037 kali lebih patuh membayar iuran dibandingkan responden yang pengetahuannya kurang baik. Berdasarkan angka p-value (0.000) yang nilainya dibawah

0.05, maka artinya terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 100 responden, terdapat responden dengan persepsi negatif dan tidak patuh sebanyak 44 orang (93,6%), sedangkan responden yang memiliki persepsi positif dan patuh membayar iuran sebanyak 46 orang (86,8%). Dari hasil analisis diperoleh juga nilai OR sebesar 0,010 artinya responden dengan persepsi positif berpeluang 0,010 kali lebih patuh membayar iuran dibandingkan responden dengan persepsi negatif. Berdasarkan angka p-value (0.000) yang nilainya dibawah 0.05, maka artinya terdapat hubungan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

## **Pembahasan**

### **Hubungan Antara Pendapatan dan Kepatuhan Membayar Iuran PBPU Pekerja Mandiri Di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.**

Berdasarkan tabel 2 dari uji bivariat diketahui bahwa dari 100 orang responden, 47 orang yang pendapatannya tinggi berperilaku patuh dalam membayar iuran BPJS. Sementara 25 orang yang pendapatannya rendah, tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Dari hasil analisa cross sectional diketahui pula bahwa p-value adalah 0.000 yang mana dibawah nilai  $\alpha(0.05)$ , artinya terdapat hubungan antara pendapatan dan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Teori yang menjelaskan mengenai hal tersebut adalah teori dari Lawrence Green dalam Notoatmodjo Soekidjo yang menyatakan bahwa pendapatan adalah salah satu faktor predisposisi (predisposing factor) yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan.<sup>8</sup> Pendapatan berperan dalam faktor predisposisi. Misalnya, orang dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin lebih mampu untuk membayar iuran BPJS sehingga, mengakses layanan medis secara rutin, atau membeli makanan sehat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rismawati yang berjudul Factors related with compliance paying of bpjs mandiri insurance/Contribution in the working area of batalaiworu public health Center in 2017 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Pendapatan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Batalaiworu Tahun 2017 dengan nilai  $p = 0,023$  ( $P \text{ Value} < \alpha$ ).<sup>11</sup>

Peneliti berasumsi bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Iuran BPJS, karena dengan nilai uang pendapatan yang terbatas peserta cenderung akan mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, dari pada pembayaran iuran BPJS yang belum tentu mereka gunakan segera. Hal itu mengakibatkan keinginan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan menjadi tidak diutamakan. Sehingga peneliti menyarankan untuk BPJS melakukan edukasi dengan menggandeng kader wilayah setempat untuk sosialisasi pentingnya membayar iuran tepat waktu agar jika sakit dapat langsung digunakan kepesertaan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Keuntungan kedisiplinan menyisihkan pendapatan untuk membayar iuran BPJS adalah terhindarnya dari resiko pengeluaran yang lebih besar jika harus mendapatkan layanan kesehatan secara pribadi tanpa pembiayaan dari BPJS.

### **Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Kepatuhan Membayar Iuran PBPU Pekerja Mandiri Di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.**

Berdasarkan tabel 2 dari hasil uji univariat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 63 orang memiliki anggota keluarga yang besar dan sisanya sebanyak 37 memiliki anggota keluarga yang masuk dalam lingkup keluarga yang kecil. Dari hasil uji bivariat diketahui bahwa dari 100 orang responden, 32 orang yang anggota keluarga kecil, berperilaku patuh dalam membayar iuran BPJS. Sementara 46 orang yang tanggungan keluarganya banyak, berperilaku tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Dari hasil analisa cross sectional diketahui pula bahwa p-value adalah 0.000 yang mana dibawah nilai  $\alpha(0.05)$ , artinya terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Notoatmodjo Soekidjo menyatakan jumlah anggota keluarga adalah faktor yang berwujud (predisposing factor) yang mempengaruhi sikap atau kepatuhan peserta membayar iuran BPJS.<sup>8</sup> Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi kepatuhan membayar BPJS, ini terkait dengan nominal pembayaran yang otomatis akan lebih tinggi jika jumlah keluarganya banyak. Tetapi jika peserta menyadari akan manfaat BPJS tentunya akan lebih memprioritaskan pembayaran iuran untuk menghindari resiko pengeluaran yang lebih besar jika mengeluarkan biaya pribadi untuk pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fajrini yang menunjukkan bahwa responden yang tidak patuh membayar iuran tertinggi adalah responden yang memiliki jumlah keluarga banyak, yaitu (37,7%) dengan jumlah 23 responden dibanding jumlah keluarga sedikit, yaitu (53,8%) dengan jumlah 21 responden.<sup>12</sup>

Asumsi peneliti, hal tersebut menjelaskan bahwa dengan anggota keluarga besar maka jumlah iuran otomatis akan menjadi lebih besar, dengan demikian maka ada keengganan dari peserta untuk membayar iuran BPJS dengan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya apalagi jika peserta tersebut memilih kelas 1 sehingga iuran perbulannya pun akan menjadi lebih besar. Sehingga peneliti menyarankan untuk peserta dengan jumlah anggota keluarga besar dapat memilih kelas sesuai dengan kemampuan ekonominya agar iuran BPJS Kesehatan dapat tetap dibayarkan sehingga jika sakit dapat langsung digunakan kepesertaan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Keuntungan bagi peserta dengan keluarga besar jika membayar iuran BPJS tepat waktu adalah terhindar dari pembiayaan lebih besar jika menggunakan pembiayaan pribadi.

#### **Hubungan Antara Akses Pembayaran dan Kepatuhan Membayar Iuran PBPJ Mandiri Di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.**

Berdasarkan tabel 2 dari hasil uji univariat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 97 orang menyatakan mudah dijangkau dalam mengakses tempat pembayaran dan sisanya sebanyak 3 responden menyatakan sulit dijangkau. Dari hasil uji bivariat diketahui bahwa dari 100 orang responden diketahui 49 responden yang menyatakan mudah dijangkau dalam mendapatkan akses pembayaran orang berperilaku patuh dalam membayar iuran BPJS. Sementara 3 orang responden yang menyatakan kesulitan dalam mengakses tempat pembayaran, seluruhnya tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Dari hasil analisa cross sectional diketahui pula bahwa p-value adalah 0.085 yang mana diatas nilai  $\alpha(0.05)$ , artinya tidak terdapat hubungan antara jumlah akses pembayaran dan kepatuhan membayar iuran PBPJ pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Notoatmodjo Soekidjo menyebutkan dalam teorinya bahwa kemudahan akses pembayaran merupakan salah satu faktor pendorong (reinforcing factor) yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menerima faktor kesehatan yang diantaranya membayar iuran untuk mendapatkan layanan kesehatan.<sup>8</sup> Kemudahan akses pembayaran akan mempengaruhi niat dan minat peserta untuk membayar iuran tepat waktu, tetapi tetap dipengaruhi oleh kesadaran pentingnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Miftahul yang berjudul faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri di wilayah kerja puskesmas wawondula yang menyimpulkan bahwa responden dengan akses pembayaran mudah tetapi kurang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri adalah sebanyak 12 orang (15,0%). Sedangkan responden dengan akses pembayaran sulit tetapi patuh membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri sebanyak 8 orang (76,8%).<sup>13</sup>

Asumsi peneliti pada hasil penelitian yang berbeda disebabkan kondisi daerah penelitian yang termasuk perkotaan, tentu saja akses untuk membayar iuran sangatlah banyak, karena saat ini pembayaran iuran BPJS dapat dilakukan dimana saja seperti di mini market, ataupun bisa melalui aplikasi platform market online.

#### **Hubungan Antara Pengetahuan dan Kepatuhan Membayar Iuran PBPJ Mandiri Di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.**

Berdasarkan tabel 2 pada uji univariat diketahui sebagian besar responden yaitu 60 orang memiliki pengetahuan yang baik tentang BPJS dan sisanya sebanyak 40 responden berpengetahuan kurang baik. Pada uji bivariat diketahui bahwa dari 100 orang responden, 36 orang yang memiliki

tingkat pengetahuan yang kurang baik, berperilaku tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Sementara 45 orang yang tingkat pengetahuannya baik, berperilaku patuh dalam membayar iuran BPJS. Dari hasil analisa cross sectional diketahui pula bahwa p-value adalah 0.000 yang mana dibawah nilai  $\alpha(0.05)$ , artinya terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan membayar iuran PBPJ pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Teori Notoatmodjo sejalan dengan penelitian ini bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behaviour). Dalam hal ini tindakan untuk membayar iuran BPJS.<sup>8</sup> Dengan pengetahuan yang tinggi atas pelayanan BPJS dan resiko ketika tidak melakukan pembayaran akan mendorong peserta untuk lebih mengutamakan pembayaran iuran.

Hal tersebut diatas sesuai dengan penelitian Hasyim yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri di wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari, yang menyatakan bahwa hasil uji statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha=0,05$ , diperoleh hasil ada hubungan cukup kuat antara pengetahuan dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS (p-value = 0,000).<sup>14</sup>

Asumsi peneliti, pengetahuan sangat berpengaruh pada kemauan peserta untuk membayar iuran karena dengan pengetahuan yang baik maka peserta akan menyadari penting dan besarnya manfaat yang akan didapat jika BPJS dibayar tepat waktu. Bukan hanya membayar iuran jika membutuhkan saja, karena jika baru membayar iuran saat sakit maka akan ada biaya tambahan seperti denda pelayanan yang harus dibayarkan oleh peserta dengan nominal yang lumayan besar. Hal itu menyebabkan menjadi pengeluaran tambahan yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan jika rutin membayar iuran BPJS Kesehatan tiap bulan.

### **Hubungan Antara Persepsi dan Kepatuhan Membayar Iuran PBPJ Pekerja Mandiri Di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.**

Berdasarkan tabel 2 pada uji univariat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 53 orang memiliki persepsi positif tentang BPJS dan sisanya sebanyak 47 responden memiliki persepsi negatif. Pada uji bivariat diketahui bahwa dari 100 orang responden, 44 orang yang memiliki persepsi negatif, berperilaku tidak patuh dalam membayar iuran BPJS. Sementara 46 orang yang memiliki persepsi positif, berperilaku patuh dalam membayar iuran BPJS. Dari hasil analisa cross sectional diketahui pula bahwa p-value adalah 0.000 yang mana dibawah nilai  $\alpha(0.05)$ , artinya terdapat hubungan antara persepsi dan kepatuhan membayar iuran PBPJ pekerja mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur.

Teori yang berkaitan dari Marbun, menyatakan bahwa pembentukan persepsi sangat dipengaruhi oleh informasi atau rangsangan yang pertama kali diperoleh alat indera manusia itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan badan penyelenggara asuransi kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara teratur.<sup>15</sup> Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Rismawati yang berjudul *Factors related with compliance paying of bpjs mandiri insurance/ Contribution in the working area of batalaiworu public health Center in 2017* dimana hasil yang didapatkan adalah ada hubungan antara Persepsi tentang JKN dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Batalaiworu Tahun 2017 dengan n nilai  $p = 0,042$  ( $P \text{ Value} < \alpha$ ).<sup>11</sup>

Peneliti berasumsi bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk terus membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara teratur. Pengalaman pertama yang tidak menyenangkan pada pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat akan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi seorang terhadap kebutuhan untuk memperpanjang masa kepesertaannya serta keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebaliknya bagi peserta asuransi kesehatan yang memiliki persepsi positif terhadap tempat pelayanan kesehatan akan meningkatkan keteraturannya dalam membayar iuran asuransi kesehatan karena peserta telah mendapatkan pelayanan serta pengalaman yang baik saat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga akan meningkatkan kesinambungan kepesertaan dana sehat tersebut.

Berdasarkan uji univariat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (51%) tidak patuh dalam membayar iuran BPJS, sebagian besar responden (73%) mempunyai pendapatan yang cukup, sebagian besar responden (63%) mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, sebagian besar responden (97%) menyatakan mudah dalam mengakses tempat pembayaran, sebagian besar responden (60%) memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, dan sebagian besar responden (53%) mempunyai persepsi positif terhadap pelayanan BPJS. Terdapat hubungan antara pendapatan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan, dan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur. Analisis dengan nilai P-value menunjukkan 0.000 yaitu dibawah nilai  $\alpha(0.05)$ . Tidak terdapat hubungan antara akses pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran pada PBPU Pekerja Mandiri di BPJS Kesehatan KC Jakarta Timur, dengan P-value menunjukkan 0.085 yaitu diatas nilai  $\alpha(0.05)$ .

Terdapat banyak manfaat yang diperoleh oleh peserta BPJS ketika membayar tepat waktu seperti kelancaran akses peserta dalam mendapatkan layanan kesehatan dan memiliki hak dan manfaat penuh sesuai dengan program jaminan kesehatan, peserta terus mendapatkan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan, terhidar dari risiko pengeluaran tambahan untuk biaya pengobatan karena semua biaya ditanggung oleh BPJS.

Sebagai saran bagi Kantor BPJS agar melakukan langkah-langkah Penyederhanaan Proses Pembayaran: Upayakan untuk menyederhanakan proses pembayaran iuran BPJS. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi, seperti pembayaran online atau melalui aplikasi, untuk memudahkan peserta. Peningkat Pembayaran: Kirimkan pengingat pembayaran secara berkala kepada peserta melalui SMS, email, atau notifikasi aplikasi untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Program Insentif: Pertimbangkan untuk memberikan insentif kepada peserta yang membayar iuran secara tepat waktu. Misalnya, diskon atau manfaat tambahan bagi mereka yang konsisten membayar. Pemantauan dan Evaluasi: Lakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap tingkat kepatuhan pembayaran. Dengan memahami perubahan tren, sehingga dapat menyesuaikan strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Bagi peserta BPJS disarankan untuk membayar iuran tepat waktu agar tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang berkesinambungan, menghindari denda atas keterlambatan, dan agar tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perlindungan kesehatan. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami lebih dalam mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran pada PBPU mandiri BPJS. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu referensi bagi rekan peneliti lain dalam penelitian selanjutnya yang mengambil objek yang sama mengenai kepatuhan membayar iuran BPJS. Penelitian ini diharapkan juga dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain.

### **Makna Singkatan**

BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PBPU : Pekerja Bukan Penerima Upah

### **Persetujuan Etik**

Penelitian ini telah melalui proses uji etik pada komisi etik penelitian kesehatan Universitas Indonesia Maju dan dinyatakan lulus uji etik dengan nomor: No.6554/Sket/Ka-Dept/RE/UIMA/IX/2023.

### **Konflik Kepentingan**

Penelitian ini merupakan penelitian independent, tidak ada konflik kepentingan individu dan organisasi.

### **Pendanaan**

Penelitian ini menggunakan sumber dana pribadi.

### **Kontribusi Penulis**

Penelitian ini dilakukan oleh Rahmasari sebagai author.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur yang telah membantu memberikan izin terhadap pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada responden yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian

### References

1. Presiden RI. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Jkt Pres Repub Indones. 2018;
2. Thabrany H. Jaminan Kesehatan Nasional Edisi 2. Jkt PT Raja Graf Persada. 2014;2.
3. Kemendikbud. Arti Kata. In KBBI (V). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 2020.
4. bpjs-kesehatan.go.id. Iuran [Internet]. 2023 [cited 2023 May 29]. Available from: <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/>
5. Sismonev.djsn.go.id. Aspek Kepesertaan [Internet]. 2023 [cited 2023 May 29]. Available from: <http://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/>
6. BPJS Kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019. Jakarta: Humas BPJS; 2019.
7. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta. Jkt Indones. 2010;
8. Notoatmodjo S. Metodologi penelitian kesehatan. 2012;
9. Hidayat AA. Metode penelitian kesehatan paradigma kuantitatif. Health Books Publishing; 2015.
10. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta; 2016.
11. Jufri RLNN. FACTORS RELATED WITH COMPLIANCE PAYING OF BPJS MANDIRI INSURANCE/CONTRIBUTION IN THE WORKING AREA OF BATALAIWORU PUBLIC HEALTH CENTER IN 2017.
12. Fajrini F, Latifah A N, Herdiansyah D, Firda N. Studi Ketidapatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. Muhammadiyah Public Health J. 2021;1(2):129–38.
13. Jannah M. Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula. Window Public Health J. 2022;3(2):250–9.
14. Hasyim A, Idrus M, Rizky S. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari. Miracle J Public Health. 2019;2(1):1–9.
15. Sugihartono FKN, Harahap F, Setiawati FA, Nurhayati SR. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta. UNY Press; 2007.

\*Original Article..

--- ISJMHS ---